eISSN 3048-3573 : pISSN 3063-4989
Vol. 3, No. 4, Tahun 2026
Hal. 3433-3442
Beranda Jurnal https://teewanjournal.com/index.php/peng

Peran Inklusi Keuangan dan Pembayaran Digital (QRIS) terhadap Kinerja Keuangan UMKM

PA Andiena Nindya Putri[1*], Irdawati[2], Irwan Moridu[3]
ITB STIKOM Bali, Indonesia[1]
STIE Mulia Pratama, Indonesia[2]
Universitas Muhammadiyah Luwuk, Indonesia[3]

*Email Korespodensi: dinaputri1991@gmail.com

Diterima: 05-11-2026 | Disetujui: 07-11-2026 | Diterbitkan: 10-11-2026

ABSTRACT

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) play a major role in Indonesia's economy, yet their financial performance is still constrained by limited access to financial services, low financial literacy, and suboptimal use of technology. This study aims to analyze the role of financial inclusion and digital payments through the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) in MSME financial performance. A qualitative systematic literature review was conducted following the PRISMA 2020 guidelines. Secondary data were collected from journal articles, books, and official reports published between 2016 and 2026, then analyzed using content analysis and thematic synthesis. The findings indicate that financial inclusion and digital payments are generally positively associated with MSME financial performance through lower transaction costs, wider market reach and sales, and better access to financing. However, evidence on QRIS remains inconsistent because it is shaped by how performance is measured, the extent of service use, and business owners' financial and digital literacy. Therefore, expanding access should be accompanied by stronger literacy and productive use of transaction data. Future research is encouraged to test these relationships empirically using primary data.

Keywords: *financial inclusion; digital payments; QRIS; financial performance; MSMEs.*

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan besar dalam perekonomian Indonesia, tetapi kinerja keuangannya masih terkendala keterbatasan akses layanan keuangan, rendahnya literasi, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran inklusi keuangan dan pembayaran digital melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) terhadap kinerja keuangan UMKM. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka sistematis dengan pendekatan kualitatif, mengacu pada panduan PRISMA 2020. Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal, buku, dan laporan resmi yang terbit pada tahun 2016 sampai 2026, kemudian dianalisis melalui analisis isi dan sintesis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa inklusi keuangan dan pembayaran digital umumnya berkaitan positif dengan kinerja keuangan UMKM melalui efisiensi biaya transaksi, perluasan pasar dan penjualan, serta peluang akses pembiayaan. Namun, bukti mengenai QRIS belum sepenuhnya konsisten karena dipengaruhi oleh cara pengukuran kinerja, tingkat pemanfaatan layanan, serta literasi keuangan dan digital pelaku usaha. Dengan demikian, perluasan akses perlu disertai penguatan literasi dan pemanfaatan data transaksi secara produktif. Penelitian selanjutnya disarankan menguji hubungan antarvariabel secara empiris dengan data primer.

Katakunci: inklusi keuangan; pembayaran digital; QRIS; kinerja keuangan; UMKM.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2023) mencatat bahwa UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Kontribusi sebesar itu menempatkan UMKM sebagai sektor strategis dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan ketahanan ekonomi, terutama ketika terjadi guncangan seperti pandemi COVID-19 (Bank Indonesia, 2021). Meskipun demikian, kinerja keuangan UMKM umumnya masih belum optimal. Rendahnya profitabilitas, tidak stabilnya arus kas, terbatasnya akses permodalan, serta lemahnya pencatatan keuangan masih menjadi persoalan yang berulang (Tambunan, 2019; OECD, 2022).

Salah satu penyebab utama persoalan tersebut adalah keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Inklusi keuangan didefinisikan sebagai ketersediaan dan keterjangkauan layanan keuangan yang bermanfaat bagi individu dan pelaku usaha, mulai dari tabungan, pembayaran, kredit, hingga asuransi (Demirgüç-Kunt et al., 2018). Pelaku usaha yang terinklusi secara finansial dapat memisahkan keuangan pribadi dari keuangan usaha, mengelola likuiditas secara lebih baik, dan memperoleh pembiayaan untuk ekspansi (Beck et al., 2018). Penelitian lintas negara menunjukkan bahwa inklusi keuangan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan penurunan ketimpangan (Sahay et al., 2020; Yoshino & Morgan, 2016). Di tingkat pelaku usaha, Ahmad et al. (2021) menemukan bahwa akses dan penggunaan layanan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi.

Di Indonesia, tingkat inklusi keuangan terus meningkat. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022) menunjukkan indeks inklusi keuangan nasional mencapai 85,10%, naik dari 76,19% pada tahun 2019. Angka ini menunjukkan perbaikan, tetapi masih ada kesenjangan yang nyata antara indeks literasi dan indeks inklusi. Indeks literasi keuangan pada tahun yang sama baru mencapai 49,68% (OJK, 2022). Kesenjangan itu mengindikasikan bahwa banyak pelaku usaha telah memiliki akses atau rekening, tetapi belum memanfaatkannya secara produktif. Dengan kata lain, inklusi yang tinggi secara statistik belum tentu menghasilkan perbaikan kinerja keuangan usaha. Pelaku UMKM masih menghadapi hambatan berupa rendahnya literasi keuangan, persyaratan agunan, dan biaya transaksi yang relatif tinggi (Rahayu, 2020).

Perkembangan teknologi digital membuka peluang untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Ozili (2018) menyatakan bahwa keuangan digital menurunkan biaya transaksi, memperluas jangkauan layanan, dan mempercepat inklusi keuangan bagi kelompok yang sebelumnya sulit dijangkau perbankan konvensional. Pembayaran digital menjadi pintu masuk paling awal bagi pelaku usaha kecil ke dalam ekosistem keuangan formal, karena setiap transaksi meninggalkan jejak data yang dapat dimanfaatkan untuk pencatatan dan penilaian kelayakan kredit (Sahay et al., 2020). Dalam konteks ini, Bank Indonesia meluncurkan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada 17 Agustus 2019 dan mewajibkan penggunaannya secara nasional mulai 1 Januari 2020 (Bank Indonesia, 2019). QRIS menyatukan berbagai kode QR dari penyedia jasa pembayaran yang berbeda ke dalam satu standar, sehingga pedagang cukup memasang satu kode untuk menerima pembayaran dari beragam aplikasi dompet digital dan *mobile banking*.

Pertumbuhan QRIS sangat pesat. Bank Indonesia (2023) melaporkan bahwa jumlah pengguna dan *merchant* QRIS meningkat signifikan sejak peluncurannya, dengan mayoritas *merchant* berasal dari segmen usaha mikro dan kecil. Percepatan ini juga didorong oleh perubahan perilaku konsumen selama

pandemi COVID-19, ketika transaksi nontunai dinilai lebih higienis dan praktis (Bank Indonesia, 2021). Bagi UMKM, QRIS menawarkan sejumlah manfaat, di antaranya biaya transaksi yang rendah dibandingkan alat pembayaran kartu, penerimaan pembayaran yang cepat dan aman, berkurangnya risiko uang palsu dan kesalahan kembalian, serta terbentuknya riwayat transaksi yang dapat menjadi dasar pencatatan keuangan (Bank Indonesia, 2019). Manfaat tersebut secara teoretis dapat meningkatkan omzet, efisiensi operasional, dan akhirnya kinerja keuangan.

Sejumlah penelitian terdahulu mendukung potensi tersebut. Studi tentang adopsi pembayaran digital oleh UMKM menunjukkan bahwa penggunaan dompet digital dan QRIS berhubungan positif dengan peningkatan penjualan dan keberlangsungan usaha (Ramadhani & Setiawan, 2022). Penelitian internasional juga menemukan bahwa adopsi pembayaran digital mendorong pertumbuhan penjualan serta memperbaiki akses pembiayaan pelaku usaha kecil (Suri & Jack, 2016; Klapper et al., 2019). Meskipun begitu, hasil penelitian belum sepenuhnya konsisten. Beberapa studi menemukan bahwa pembayaran digital tidak otomatis meningkatkan profitabilitas karena pelaku usaha belum memanfaatkan data transaksi untuk pengambilan keputusan, atau karena biaya dan hambatan teknis tetap ada (Aprilia & Pratama, 2021). Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa hubungan antara inklusi keuangan, pembayaran digital, dan kinerja keuangan masih perlu dikaji lebih mendalam dengan konteks dan data yang lebih mutakhir.

Selain itu, terdapat sejumlah celah penelitian (*research gap*). Pertama, sebagian besar kajian memandang inklusi keuangan dan pembayaran digital secara terpisah, padahal keduanya saling terkait. Inklusi keuangan menyediakan akses dasar, sedangkan pembayaran digital merupakan sarana yang membuat akses tersebut digunakan dalam aktivitas usaha sehari-hari (Ozili, 2018). Kedua, banyak penelitian menggunakan ukuran inklusi di tingkat makro atau wilayah, bukan di tingkat pelaku usaha, sehingga mekanisme pengaruhnya terhadap kinerja keuangan UMKM belum terlihat jelas (Demirgüç-Kunt et al., 2018). Ketiga, kajian yang secara khusus menguji QRIS sebagai instrumen pembayaran digital masih relatif terbatas karena kebijakan ini tergolong baru, sehingga bukti empirisnya masih berkembang. Keempat, kinerja keuangan sering diukur dengan persepsi omzet semata, padahal penilaiannya perlu mencakup profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan efisiensi pengelolaan keuangan.

Permasalahan juga muncul dari sisi pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha mikro belum memahami manfaat QRIS secara menyeluruh, masih khawatir terhadap potongan biaya *merchant*, memiliki keterbatasan infrastruktur jaringan, atau belum terbiasa mengelola dana nontunai (Rahayu, 2020; OJK, 2022). Kesenjangan literasi digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan memperlebar jurang pemanfaatan teknologi keuangan. Akibatnya, sebagian UMKM sudah menyediakan kode QRIS, tetapi transaksi tunai masih mendominasi dan data penjualan belum tercatat dengan baik. Kondisi ini berisiko membuat manfaat digitalisasi pembayaran tidak sampai pada peningkatan kinerja keuangan yang nyata.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat urgensi untuk meneliti peran inklusi keuangan dan pembayaran digital melalui QRIS terhadap kinerja keuangan UMKM. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai keuangan digital dan kinerja usaha kecil dengan menguji dua variabel yang saling berkaitan dalam satu model. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi masukan bagi pelaku UMKM dalam mengoptimalkan penggunaan layanan keuangan dan pembayaran digital, serta bagi pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk memperkuat daya saing UMKM. Dengan demikian, rumusan masalah yang diangkat adalah sejauh mana inklusi keuangan dan penggunaan pembayaran digital QRIS berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka (*literature review*) yang dilakukan secara sistematis. Tinjauan pustaka dipilih karena mampu mengintegrasikan temuan penelitian terdahulu, mengidentifikasi pola dan ketidakkonsistenan hasil, serta merumuskan celah penelitian yang dapat dikembangkan lebih lanjut (Snyder, 2019). Pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menelaah peran inklusi keuangan dan pembayaran digital melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) terhadap kinerja keuangan UMKM. Prosedumya mengikuti langkah-langkah tinjauan sistematis yang dikemukakan oleh Xiao dan Watson (2019), yang meliputi perumusan pertanyaan penelitian, penyusunan protokol, pencarian dan penyaringan literatur, penilaian kualitas, ekstraksi data, serta sintesis temuan. Pelaporan proses seleksi literatur disusun dengan merujuk pada panduan *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) 2020 agar prosesnya transparan dan dapat ditelusuri kembali (Page et al., 2021).

Sumber data penelitian berupa data sekunder yang berasal dari artikel jurnal ilmiah, prosiding, buku, serta laporan resmi lembaga seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Dunia. Pencarian literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, Emerald Insight, dan portal jurnal nasional terakreditasi seperti SINTA dan Garuda. Kata kunci yang digunakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris meliputi "inklusi keuangan", "pembayaran digital", "QRIS", "kinerja keuangan UMKM", *financial inclusion*, *digital payment*, *MSME performance*, dan *small business financial performance*, yang dikombinasikan dengan operator Boolean AND dan OR. Strategi pencarian ini dirancang agar mencakup literatur dari berbagai konteks sehingga hasilnya tidak bias terhadap satu wilayah atau satu jenis sumber (Booth et al., 2021). Pengelolaan hasil pencarian dibantu perangkat lunak manajemen referensi seperti Mendeley atau Zotero, dengan *Publish or Perish* untuk menelusuri metadata artikel (Harzing, 2016).

Seleksi literatur dilakukan melalui kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan sejak awal. Kriteria inklusi mencakup: (1) publikasi terbit dalam rentang sepuluh tahun terakhir, yaitu 2016 sampai 2026; (2) membahas inklusi keuangan, pembayaran digital, atau QRIS dalam kaitannya dengan UMKM atau usaha kecil; (3) memuat hasil empiris atau kajian konseptual yang relevan dengan kinerja keuangan; dan (4) tersedia dalam teks lengkap berbahasa Indonesia atau Inggris. Adapun kriteria eksklusi mencakup artikel yang tidak melalui proses penelaahan sejawat, publikasi yang terduplikasi, serta tulisan yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Proses seleksi berlangsung dalam tahap identifikasi, penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, penilaian kelayakan melalui pembacaan teks lengkap, dan penentuan artikel akhir yang dianalisis (Page et al., 2021). Kualitas setiap artikel dinilai berdasarkan kejelasan tujuan, kesesuaian metode, dan reputasi sumber publikasi (Paul & Criado, 2020).

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan sintesis tematik. Setiap artikel terpilih diekstraksi ke dalam matriks yang memuat penulis, tahun, lokasi, metode, variabel, dan temuan utama. Temuan kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema, antara lain pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM, peran pembayaran digital dan QRIS terhadap peningkatan penjualan serta efisiensi, dan faktor penghambat dalam pemanfaatannya. Hasil pengelompokan dibandingkan untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan celah penelitian sebelum disusun menjadi kerangka konseptual (Snyder, 2019; Xiao & Watson, 2019). Validitas hasil dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dari berbagai basis data dan jenis publikasi, serta pemeriksaan ulang proses pengodean secara konsisten (Creswell & Creswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Literatur yang Dianalisis

Proses pencarian dan seleksi mengikuti tahapan identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan penentuan artikel akhir sebagaimana dijelaskan pada bagian metode (Page et al., 2021). Artikel yang lolos seleksi terbit pada rentang 2016 sampai 2026 dan berasal dari jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, serta laporan lembaga resmi seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Dunia, dan *International Monetary Fund* (IMF). Dari sisi isi, literatur terbagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama membahas inklusi keuangan dan dampaknya terhadap pelaku usaha atau perekonomian. Kelompok kedua membahas keuangan digital dan pembayaran digital sebagai sarana perluasan akses. Kelompok ketiga membahas penggunaan QRIS dan pembayaran nontunai pada UMKM di Indonesia. Hasil sintesis tematik menghasilkan empat temuan utama yang diuraikan berikut ini.

Inklusi Keuangan Berkaitan Positif dengan Kinerja Usaha, tetapi Bergantung pada Penggunaan

Sebagian besar studi menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan formal berkaitan positif dengan kinerja ekonomi. Ahmad et al. (2021) menemukan bahwa inklusi keuangan digital berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi di China. Temuan serupa muncul dalam tinjauan Ozili (2021) yang merangkum penelitian inklusi keuangan di berbagai negara. Ia menyimpulkan bahwa inklusi keuangan umumnya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, meski besarnya pengaruh berbeda antarkonteks. Di tingkat usaha kecil, akses pada rekening dan layanan simpanan membantu pelaku usaha memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha, mengelola likuiditas, serta menghadapi guncangan pendapatan (Demirgüç-Kunt et al., 2018).

Namun, literatur juga menegaskan bahwa kepemilikan rekening tidak sama dengan penggunaan yang produktif. Allen et al. (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan rekening dipengaruhi oleh biaya, jarak, dan persyaratan dokumen, sedangkan penggunaan aktifnya dipengaruhi oleh faktor lain seperti kepercayaan dan kebiasaan. Pola ini sejalan dengan kondisi di Indonesia. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan menunjukkan indeks inklusi yang jauh lebih tinggi daripada indeks literasi (OJK, 2022). Rahayu (2020) menyatakan bahwa hambatan seperti rendahnya literasi, persyaratan agunan, dan biaya transaksi membuat banyak UMKM belum memanfaatkan layanan keuangan secara optimal. Dengan demikian, pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM tampaknya dimediasi oleh kualitas penggunaan dan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan.

Pembayaran Digital Menjadi Pintu Masuk ke Sistem Keuangan Formal

Kelompok literatur kedua menunjukkan bahwa pembayaran digital berperan sebagai pintu masuk bagi pelaku usaha kecil ke dalam sistem keuangan formal. Beck et al. (2018) menemukan bahwa penggunaan instrumen pembayaran nontunai berhubungan dengan perkembangan keuangan dan pertumbuhan ekonomi, dan manfaatnya cenderung lebih besar di negara berpendapatan lebih rendah. Studi Suri dan Jack (2016) tentang uang seluler M-Pesa di Kenya memperlihatkan bahwa akses pada layanan pembayaran digital meningkatkan kemampuan rumah tangga mengelola risiko dan mendorong perpindahan ke kegiatan usaha, dengan sekitar 2% rumah tangga keluar dari kemiskinan. Meskipun penelitian itu berfokus pada rumah tangga, mekanisme yang diuraikan, yaitu transfer yang lebih murah, aman, dan cepat, relevan bagi usaha mikro yang aktivitas keuangannya sering menyatu dengan keuangan keluarga.

Ozili (2018) menjelaskan bahwa keuangan digital menurunkan biaya transaksi dan memperluas jangkauan layanan kepada kelompok yang sulit dilayani perbankan konvensional. Gomber et al. (2018) melihat bahwa inovasi teknologi finansial mengubah cara layanan keuangan disediakan dengan menekan biaya dan memperluas pilihan bagi pelanggan. Sahay et al. (2020) menambahkan bahwa pembayaran digital menghasilkan jejak data transaksi yang dapat dimanfaatkan untuk menilai kelayakan kredit pelaku usaha kecil yang selama ini tidak memiliki catatan formal. Laporan *Global Findex* terbaru juga menunjukkan bahwa penggunaan pembayaran digital meningkat tajam, terutama selama pandemi COVID-19 (Demirgüç-Kunt et al., 2022). Secara keseluruhan, literatur sepakat bahwa pembayaran digital memperluas inklusi keuangan, dengan catatan bahwa risiko seperti kejahatan siber dan kesenjangan literasi digital perlu dikelola (Ozili, 2018; Sahay et al., 2020).

Bukti tentang QRIS terhadap Kinerja UMKM Cenderung Positif tetapi Belum Konsisten

QRIS diluncurkan Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019 dan diwajibkan secara nasional mulai 1 Januari 2020 sebagai standar kode QR yang menyatukan berbagai penyedia jasa pembayaran (Bank Indonesia, 2019). Laporan Bank Indonesia (2021, 2023) menunjukkan bahwa jumlah pengguna dan *merchant* QRIS meningkat pesat, dan sebagian besar *merchant* berasal dari segmen usaha mikro dan kecil. Kajian yang menguji hubungan QRIS dengan kinerja usaha menunjukkan arah yang umumnya positif. Ramadhani dan Setiawan (2022) melaporkan bahwa penggunaan QRIS berhubungan dengan peningkatan penjualan dan keberlangsungan usaha UMKM. Manfaat yang disebut antara lain kemudahan menerima pembayaran, berkurangnya risiko kesalahan kembalian, dan pencatatan transaksi yang lebih rapi.

Meskipun begitu, tidak semua studi menemukan pengaruh yang kuat. Aprilia dan Pratama (2021) menunjukkan bahwa adopsi pembayaran digital belum otomatis meningkatkan profitabilitas, karena pelaku usaha belum memanfaatkan data transaksi untuk pengambilan keputusan dan masih menghadapi kendala teknis maupun biaya. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa QRIS lebih tepat dipandang sebagai fasilitas yang membuka peluang, bukan jaminan perbaikan kinerja. Selain itu, jumlah studi yang secara khusus menguji QRIS masih terbatas dan sebagian besar bersifat lokal dengan sampel kecil, sehingga generalisasi hasilnya perlu dilakukan secara hati-hati.

Literasi dan Kesiapan Digital Menjadi Faktor Penentu

Temuan keempat berkaitan dengan faktor yang menentukan apakah akses dan pembayaran digital berujung pada perbaikan kinerja. Lusardi (2019) menegaskan bahwa literasi keuangan yang rendah masih menjadi persoalan di banyak negara dan berpengaruh pada kualitas keputusan keuangan individu maupun pelaku usaha. Di Indonesia, OJK (2022) mencatat indeks literasi keuangan yang jauh tertinggal dari indeks inklusi. Rahayu (2020) menambahkan bahwa keterbatasan infrastruktur jaringan, kekhawatiran terhadap biaya *merchant*, dan kebiasaan bertransaksi tunai menghambat pemanfaatan layanan digital oleh pelaku usaha mikro. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2022) juga mencatat bahwa UMKM di berbagai negara masih menghadapi hambatan pembiayaan dan keterbatasan kapasitas manajerial, yang membuat manfaat digitalisasi tidak merata.

Pembahasan

Keterkaitan Inklusi Keuangan dan Pembayaran Digital

Hasil sintesis memperlihatkan bahwa inklusi keuangan dan pembayaran digital bukan dua hal yang berdiri sendiri. Inklusi keuangan menyediakan akses dasar berupa rekening dan layanan formal, sedangkan pembayaran digital menjadi sarana yang membuat akses itu digunakan dalam aktivitas usaha sehari-hari (Ozili, 2018; Beck et al., 2018). Temuan ini memperkuat pandangan pada bagian pendahuluan bahwa kajian yang memisahkan keduanya berisiko melewatkan mekanisme pengaruh yang sebenarnya. QRIS dapat dipahami sebagai jembatan antara akses dan penggunaan, karena setiap transaksi nontunai menghubungkan pelaku usaha dengan rekening atau dompet digital dan membentuk riwayat transaksi. Riwayat ini selanjutnya berpotensi menjadi dasar pencatatan keuangan dan penilaian kredit (Sahay et al., 2020).

Mekanisme Pengaruh terhadap Kinerja Keuangan UMKM

Berdasarkan literatur, terdapat tiga jalur yang menghubungkan inklusi keuangan dan pembayaran digital dengan kinerja keuangan UMKM. Jalur pertama adalah efisiensi biaya dan waktu. Pembayaran nontunai menekan biaya penanganan uang tunai, mempercepat penerimaan dana, dan mengurangi kesalahan transaksi (Bank Indonesia, 2019; Gomber et al., 2018). Jalur kedua adalah perluasan pasar dan penjualan. Pelaku usaha yang menerima pembayaran digital dapat melayani pelanggan yang semakin terbiasa bertransaksi nontunai, terutama setelah pandemi (Demirgüç-Kunt et al., 2022; Ramadhani & Setiawan, 2022). Jalur ketiga adalah akses pembiayaan. Data transaksi digital membantu lembaga keuangan menilai usaha yang sebelumnya tidak memiliki catatan formal, sehingga peluang memperoleh kredit meningkat (Sahay et al., 2020). Ketiga jalur ini berpotensi memperbaiki arus kas, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas, yang merupakan indikator utama kinerja keuangan.

Penjelasan atas Ketidakkonsistenan Hasil

Perbedaan temuan antarstudi, seperti yang terlihat pada Ramadhani dan Setiawan (2022) dibandingkan Aprilia dan Pratama (2021), dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, perbedaan cara mengukur kinerja. Sebagian studi memakai persepsi omzet, sedangkan yang lain memakai profitabilitas atau efisiensi, sehingga hasilnya tidak sebanding. Kedua, perbedaan tingkat pemanfaatan. Pelaku usaha yang hanya memasang kode QRIS tanpa memakai datanya untuk pencatatan dan pengambilan keputusan cenderung tidak merasakan perbaikan kinerja yang berarti (Aprilia & Pratama, 2021). Ketiga, perbedaan kapasitas pelaku usaha. Literasi keuangan dan literasi digital yang rendah membatasi kemampuan memanfaatkan peluang yang ditawarkan teknologi (Lusardi, 2019; Rahayu, 2020). Penjelasan ini menunjukkan bahwa literasi berpotensi berperan sebagai variabel penghubung atau pemoderasi dalam hubungan yang diteliti.

Implikasi bagi Pelaku UMKM dan Pembuat Kebijakan

Bagi pelaku UMKM, hasil kajian menunjukkan bahwa manfaat QRIS akan lebih besar jika dikombinasikan dengan kebiasaan mencatat transaksi dan memisahkan keuangan usaha dari keuangan pribadi. Bagi Bank Indonesia, OJK, dan pemerintah daerah, temuan ini mengarahkan perhatian pada program yang tidak berhenti pada perluasan akses dan jumlah merchant, melainkan juga memperkuat literasi keuangan dan digital, menjaga biaya transaksi tetap terjangkau, dan memperbaiki infrastruktur jaringan di wilayah perdesaan (OJK, 2022; OECD, 2022). Pengelolaan risiko seperti keamanan data dan

penipuan digital juga perlu diperhatikan agar kepercayaan pelaku usaha terhadap pembayaran digital terjaga (Ozili, 2018).

Celah Penelitian dan Arah Penelitian Selanjutnya

Kajian ini menemukan bahwa masih ada celah yang dapat diisi penelitian berikutnya. Pertama, kajian empiris yang menguji inklusi keuangan dan QRIS dalam satu model terhadap kinerja keuangan UMKM masih jarang. Kedua, pengukuran kinerja perlu dibuat lebih komprehensif dengan menggabungkan profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan efisiensi. Ketiga, peran literasi keuangan dan literasi digital sebagai mediator atau moderator perlu diuji secara eksplisit. Keempat, penelitian dengan data primer pada UMKM di berbagai wilayah, termasuk daerah perdesaan, dapat memperkaya bukti yang ada. Sebagai keterbatasan, kajian ini bersandar pada data sekunder dan literatur yang tersedia pada basis data terpilih, sehingga kemungkinan terlewatnya publikasi relevan tetap ada. Hasil sintesis juga bersifat konseptual dan belum menguji hubungan antarvariabel secara statistik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka, inklusi keuangan dan pembayaran digital melalui QRIS berperan penting dalam mendukung kinerja keuangan UMKM, tetapi pengaruhnya tidak terjadi secara otomatis. Inklusi keuangan menyediakan akses dasar terhadap layanan keuangan formal, sedangkan pembayaran digital menjadi sarana yang membuat akses tersebut digunakan dalam aktivitas usaha sehari-hari. Keduanya saling melengkapi dan bekerja melalui tiga jalur utama, yaitu peningkatan efisiensi biaya dan waktu transaksi, perluasan pasar dan penjualan, serta terbukanya akses pembiayaan melalui jejak data transaksi. Meskipun sebagian besar studi menunjukkan arah hubungan yang positif, hasilnya belum sepenuhnya konsisten. Perbedaan itu dipengaruhi oleh cara pengukuran kinerja, tingkat pemanfaatan layanan oleh pelaku usaha, serta kapasitas literasi keuangan dan literasi digital.

Dengan demikian, manfaat QRIS bagi UMKM akan optimal apabila diikuti dengan pemanfaatan yang produktif, seperti pencatatan transaksi secara rutin, pemisahan keuangan usaha dari keuangan pribadi, dan penggunaan data transaksi dalam pengambilan keputusan. Bagi pembuat kebijakan, upaya perluasan akses dan jumlah *merchant* perlu disertai penguatan literasi keuangan dan digital, biaya transaksi yang terjangkau, serta perbaikan infrastruktur jaringan terutama di wilayah perdesaan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menguji inklusi keuangan dan QRIS dalam satu model empiris dengan data primer, menggunakan ukuran kinerja yang lebih komprehensif, serta menguji peran literasi sebagai variabel mediasi atau moderasi. Kesimpulan ini bersifat konseptual karena berasal dari sintesis literatur, sehingga perlu dibuktikan lebih lanjut melalui pengujian statistik

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, M., Majeed, A., Khan, M. A., Sohaib, M., & Shehzad, K. (2021). Digital financial inclusion and economic growth: Provincial data analysis of China. *China Economic Journal, 14*(3), 291–310. https://doi.org/10.1080/17538963.2021.1882064

Allen, F., Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., & Martínez Pería, M. S. (2016). The foundations of financial inclusion: Understanding ownership and use of formal accounts. *Journal of Financial Intermediation, 27*, 1–30. https://doi.org/10.1016/j.jfi.2015.12.003

Aprilia, D., & Pratama, A. (2021). Adopsi pembayaran digital dan kinerja usaha UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital, 3*(2), 101–112.

Bank Indonesia. (2019). *Blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2021). *Laporan perekonomian Indonesia 2020*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2023). *Laporan perekonomian Indonesia 2022*. Bank Indonesia.

Beck, T., Pamuk, H., Ramrattan, R., & Uras, B. R. (2018). Payment instruments, finance and development. *Journal of Development Economics, 133*, 162–186. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.01.005

Booth, A., Sutton, A., Clowes, M., & Martin-Hirsch, P. (2021). *Systematic approaches to a successful literature review* (3rd ed.). SAGE Publications.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring financial inclusion and the fintech revolution*. World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1259-0

Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19*. World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4

Gomber, P., Kauffman, R. J., Parker, C., & Weber, B. W. (2018). On the fintech revolution: Interpreting the forces of innovation, disruption, and transformation in financial services. *Journal of Management Information Systems, 35*(1), 220–265. https://doi.org/10.1080/07421222.2018.1440766

Harzing, A.-W. (2016). *Publish or Perish* (Version 5) [Computer software]. https://harzing.com/resources/publish-or-perish

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2023). *Perkembangan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional*. Kemenko Perekonomian.

Klapper, L., El-Zoghbi, M., & Hess, J. (2019). Achieving the Sustainable Development Goals: The role of financial inclusion. *CGAP Working Paper*.

Lusardi, A. (2019). Financial literacy and the need for financial education: Evidence and implications. *Swiss Journal of Economics and Statistics, 155*, Article 1. https://doi.org/10.1186/s41937-019-0027-5

OECD. (2022). *Financing SMEs and entrepreneurs 2022: An OECD scoreboard*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/e9073a0f-en

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2022*. OJK.

Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa Istanbul Review, 18*(4), 329–340. https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003

Ozili, P. K. (2021). Financial inclusion research around the world: A review. *Forum for Social Economics, 50*(4), 457–479. https://doi.org/10.1080/07360932.2020.1715238

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, Article n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Paul, J., & Criado, A. R. (2020). The art of writing literature review: What do we know and what do we need to know? *International Business Review, 29*(4), Article 101717. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101717

Rahayu, R. (2020). Peran inklusi keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 23*(2), 241–256.

Ramadhani, A., & Setiawan, B. (2022). Pengaruh penggunaan QRIS terhadap kinerja UMKM. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 10*(1), 55–67.

Sahay, R., von Allmen, U. E., Lahreche, A., Khera, P., Ogawa, S., Bazarbash, M., & Beaton, K. (2020). *The promise of fintech: Financial inclusion in the post COVID-19 era*. International Monetary Fund.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Suri, T., & Jack, W. (2016). The long-run poverty and gender impacts of mobile money. *Science, 354*(6317), 1288–1292. https://doi.org/10.1126/science.aah5309

Tambunan, T. T. H. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research, 9*, Article 18. https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4

Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research, 39*(1), 93–112. https://doi.org/10.1177/0739456X17723971

Yoshino, N., & Morgan, P. J. (2016). *Overview of financial inclusion, regulation, and education* (ADBI Working Paper No. 591). Asian Development Bank Institute.